

DAULAH Umayyah, EKSPANSI DAN SISTEM PEMERINTAHAN MONARCHIHERIDETIS

Oleh : Henny Yusalia *)

Abstract:

Umayyads with Muawiyah leader, no doubt is one of the major figures in the history of Islam. One of the greatest achievements is the ability to expand the areas embraced Islam. Therefore, renowned Muawiyah with the power of expansion, so that Islam may spread to many other countries and regions quickly. Of course it's spread, often using armed force. On the other hand, what the Umayyads, is against the spirit and the things that have been done in the era of the Prophet and the first four caliphs. In particular the system of government and other areas pengislaman patterns. Unity and pluralism are valued at the time of Rasullullah SAW it was revived by the Arabization of the Umayyads. This paper is not research, but the results of the literature review the authors. In essence to describe the phenomenon of Bani Umayya.

Key words : Bani, Expansion, Islamic Leaders, Umayyah

Pendahuluan

Dalam suasana pertentangan yang sangat memuncak antara Bani Hasyim dengan Bani Umayyah, yang telah mengakibatkan perang saudara pada akhir masa *khilafah Khulafaur Rasyidin*, lahirnya Daulah Umayyah di bawah pimpinan Muawiyah ibn Abu Sofyan pada tahun 41 H (Hasjmy, 2003;151). Sejalan dengan watak dan prinsip Muawiyah serta pikirannya yang perspektif dan inovatif, ia membuat berbagai kebijaksanaan dan keputusan politik dalam dan luar negeri, dan jejak ini diteruskan oleh para penggantinya dengan menyempurnakannya.

Dinasti ini lebih banyak mengarahkan kebijakan pada perluasan kekuasaan politik atau perluasan wilayah kekuasaan negara. Perluasan wilayah di zaman Dinasti ini merupakan ekspansi besar kedua setelah ekspansi besar pertama di zaman Umar bin Khattab.

Melalui strategi-strategi ekspansi yang dilakukan pada masa pemerintahannya, banyak daerah-daerah yang berhasil dikuasai umat Islam. Kemudian dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai pada masa dinasti menjadikan kekuasaan Islam semakin luas.

Pemindahan kekuasaan kepada Muawiyah mengakhiri bentuk pemerintahan demokrasi kekhalifahan menjadi semacam monarchiheridetis (kerajaan turun-temurun), diperoleh dengan pedang, diplomasi dan tipu daya, tidak dengan pemilihan suara terbanyak. Lahirnya Daulah Umayyah dalam keadaan sedemikian rupa yang menyimpang sama sekali dari dasar-dasar

syura yang telah digariskan Rasul, dipandang sebagai suatu “peristiwa besar” dalam sejarah Islam.

Salah satu kebijaksanaan dan keputusan politik penting lainnya yang dibuat oleh khalifah Muawiyah ini mengakibatkan timbulnya dampak perubahan yang besar dalam kehidupan kaum muslimin secara umum. Diantaranya munculnya kembali kefanatikan kesukuan (*Ashabiyah Qaumiyah*) atau politik Arabisasi yang mampu menghancurkan orang-orang Arab. Tulisan ini ingin mendeskripsikan lebih lanjut mengenai strategi perluasan Islam, politik ekspansi Muawiyah dalam mempertahankan wilayah kekuasaannya, sistem monarki yang dibangun Muawiyah serta dampak yang ditimbulkan dari perubahan sistem pemerintahan tersebut, diantaranya munculnya politik Arabisasi dan politik menghancurkan orang Arab.

A. Strategi Perluasan Islam

Strategi perluasan Islam yang dilakukan Muawiyah adalah melalui politik ekspansi (perluasan wilayah). Sebelum membahas lebih lanjut tentang strategi perluasan Islam yang dilakukan pada masa Muawiyah, akan dibahas terlebih dahulu kenapa perluasan wilayah begitu intens dilakukan pada masa ini.

Pada masa pemerintahan *Khulafaur Rasyidin*, Daulah Islamiyah telah demikian meluas, tetapi perluasan tersebut belumlah sampai kepada tapal batas yang tetap. Sebab disana sini masih selalu terjadi pertikaian dan kontak-kontak pertempuran di daerah perbatasan itu. Daerah-daerah yang telah berada dalam kekuasaan Islam itu masih tetap menjadi sasaran penyerbuan pihak-pihak yang di luar Islam, dari belakang garis-garis perebutan itu. Di tambah lagi musuh di luar lingkungan Islam telah berhasil merampas beberapa daerah kepunyaan Daulah Islamiyah, ketika terjadinya perpecahan-perpecahan dan pemberontakan-pemberontakan dalam negeri dan ancaman dari luar.

Dalam keadaan semacam ini, terjadilah pertempuran-pertempuran antara Bani Umayyah dan negara tetangga mereka, yang di kebanyakan daerah-daerah pertempuran yang telah dicapai oleh perluasan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Sifat dari peperangan ini adalah bahwa ia akan berlangsung terus sampai terdapat tapal batas alami yang memisahkan antara kedua pasukan yang bermusuhan tersebut.

Seperti yang dijelaskan pula oleh Ira M Lapidus bahwa kebijakan konsolidasi rezim kekhilafahan yang terpenting adalah melanjutkan gerakan penaklukan yang berskala dunia. Serangkaian penaklukan tahap awal dilatarbelakangi sejumlah migrasi kesukuan dan pengerahan kekuatan Arab yang berpusat di beberapa pangkalan militer.

Penaklukan baru pada tahap berikutnya berlatarbelakangi ambisi kerajaan dan melibatkan sejumlah penyerangan terhadap wilayah-wilayah terpencil yang dilaksanakan oleh sejumlah kekuatan tambahan non-Arab. Maka perang yang terjadi berikutnya bukanlah perang ekspansi kesukuan, melainkan perang kerajaan yang berjuang meraih dominasi dunia. Dalam sejumlah peperangan tersebut berhasil dikuasi negeri-negeri seperti Afrika Utara, Spanyol, Transoxania, dan sebagian negeri Sindh (Lapidus, 1999:92).

Masa pemerintahan Bani Umayyah ini terkenal sebagai suatu masa dimana perhatian tumpah pada kerajaan. Ini berarti bahwa semangat dan keinginan untuk merajai dan berkuasa itu sudah mulai muncul dalam diri para

khalifah. Perluasan daerah ini telah melaksanakan keinginan yang berkobar dalam jiwa khalifah itu, serta mendatangkan kehebatan bagi negaranya pada pandangan raja-raja yang berkuasa di masa itu.

Perluasan daerah dan penaklukan-penaklukan itu barulah dapat dilakukan jika sudah ada stabilitas di dalam negeri. Selain itu harus pula ada khalifah yang kuat dan ambisius. Dengan memahami masalah ini, akan jelaslah bahwa saat yang paling cocok melakukan penaklukan dan perluasan dalam masa Daulah Umayyah adalah di masa pemerintahan Muawiyah Ibnu Abi Sofyan, dan tahun-tahun terakhir dari masa pemerintahan khalifah Abdul Malik. Selanjutnya di masa pemerintahan putranya, Al Walid. Di masa tersebutlah, terlaksananya penaklukan-penaklukan yang gemilang.

Di luar masa-masa tersebut, usaha-usaha penaklukan mengalami kemacetan atau hanya mencatat kemenangan yang sangat tipis. Daulah Umayyah di masa itu telah terbebani dengan bermacam-macam pemberontakan dalam negeri, atau diperintah oleh khalifah-khalifah yang mempunyai kecakapan terbatas, seperti beberapa khalifah di masa terakhir, atau diperintah oleh khalifah yang lebih menunjukkan cita-cita untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan untuk memperluas kekuasaan dan daerah taklukannya, misalnya Khalifah Umar Ibnu Abdil Aziz (Syalabi, 1990; 114).

Kekuatan pasukan Dinasti Umayyah telah mencatat sukses besar dalam tugas-tugas ekspansi. Terdapat tiga front ekspansi yang seluruhnya mencapai sukses gemilang, kecuali pengepungan kota Konstantinopel. Ketiga front itu adalah, *pertama*, front pertempuran melawan bangsa Rumawi di Asia kecil. Di masa daulah bani Umayyah pertempuran di front ini telah meluas, sampai meliputi pengepungan terhadap kota Constantinopel, dan penyerangan terhadap beberapa pulau di laut tengah. *Kedua*, front Afrika Utara. Front ini telah meluas sampai ke pantai Atlantik, kemudian menyeberangai selat Jabal Tariq dan sampai ke Spanyol. *Ketiga*, front Timur. Wilayah ini meluas dan terbagi kepada dua cabang yang satu menuju ke Utara, ke daerah-daerah di seberang sungai Jihun (Amu Dariah) dan Canag, yang kedua menuju ke selatan meliputi daerah Sind (Syalabi, 1990;115). Beberapa hal yang telah diuraikan di atas adalah hal yang menyebabkan kenapa perluasan wilayah begitu intens dilakukan pada masa ini.

Dinasti Bani Umayyah berdiri selama lebih kurang 90 tahun (40-132 H/661-750 M), dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Dinasti ini lebih banyak mengarahkan kebijakan pada perluasan kekuasaan politik atau perluasan wilayah kekuasaan negara baik ke Timur maupun ke Barat yang merupakan salah satu kebijakan dan keputusan politik yang dibuat oleh Muawiyah ibn Abi Sofyan yang kemudian diteruskan oleh para penggantinya. Peranan Muawiyah dalam menyebarluaskan Islam cukup besar. Pada masa pemerintahannya banyak daerah yang dikuasai umat Islam. Daerah-daerah penting yang ditaklukkan oleh Muawiyah antara lain Turki dan Armenia. Kedua daerah ini berada di bawah kekuasaan Byzantium.

Pada masa pemerintahan dinasti ini banyak kemajuan, perkembangan dan perluasan daerah yang dicapai, terlebih pada masa pemerintahan khalifah Walid ibn Abdul Malik (86-96 H/705-715 M). Muawiyah adalah pendiri Dinasti Bani Umayyah dan penguasa imperium yang sangat luas. Selama 19 tahun masa pemerintahannya ia terlibat dalam sejumlah peperangan dengan penguasa Romawi baik dalam pertempuran darat

maupun laut. Sekalipun ia bukanlah seorang prajurit yang cakap, namun kecakapannya dalam bidang manajemen dan strategi kemiliteran tidak bandingannya saat itu. Luasnya wilayah kekuasaan Islam yang ada saat ini merupakan bukti kecakapannya. Pertempuran di Shiffin juga bukti keahliannya tersebut. Begitu juga dengan penaklukan Afrika sebagai sebuah ekspansi di masa pemerintahannya (Ali, 1996; 176).

Selama masa Muawiyah, daerah kekuasaan Islam meluas sampai ke Lahore di Pakistan. Dalam upaya perluasan daerah kekuasaan Islam diarahkan ke Byzantine di wilayah Utara dan Barat (Hasan, 66). Muawiyah selalu mengarahkan upayanya untuk menguasai kota Konstantinopel, karena ia berpikir bahwa dengan jatuhnya kota tersebut akan menyebabkan jatuhnya seluruh imperium Romawi. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai persiapan dilakukan, seperti memperbesar jumlah armadanya yang mencapai 1700 kapal perang lengkap dengan perbekalan dan persenjataan (Hasjmy, 2003; 117).

Dengan kekuatan armada ini, Muawiyah mampu mengimbangi kekuatan Romawi dan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah sekitar laut tengah. Dengan armada-armada tersebut, pasukan Muawiyah berhasil menguasai Sicilia, Rodhes, dan Creta. Dalam berbagai penyerangannya, armada Islam dipimpin oleh Junadhan Ibnu Umayyah al Aziz dan Abdullah Ibnu Qays (Ali, 1996; 222). Muawiyah juga mempersiapkan pasukan perangnya dengan membentuk armada musim panas dan musim dingin untuk menghadapi peperangan di kedua musim. Peperangan ini dikenal dengan al Shawati (perang musim dingin) dan al Sawaif (perang musim panas) (Hasan, 66).

Setelah berhasil menguasai daerah darat dan laut, maka Muawiyah menuju tujuannya untuk merebut Konstantinopel dengan mempersiapkan beratus-ratus kapal perang yang besar, sarat dengan alat-alat senjata yang diperlukan untuk mengepung kota yang begitu kuat dan kokoh benteng-bentengnya. Pasukannya dipimpin putra kesayangannya, Yazid. Hanya saja, upaya ekspedisi tersebut mengalami kegagalan (Hasjmy; 2003; 117).

Tidak puas dengan penyerbuan di wilayah Timur, pasukan Bani Umayyah mengalihkan pasukannya ke wilayah Barat dan berhasil menguasai Afrika Utara, Andalusia, bahkan sampai ke Prancis pada masa berikutnya (Hoeve; 248). Daerah-daerah yang berhasil dikuasai pada masa dinasti ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan umat Islam, terutama perluasan penyebaran Islam hingga ke Spanyol, India, Asia Kecil, sampai ke Asia tengah.

Daerah-daerah yang berhasil dikuasai ini juga membangun negara besar lainnya. Akibatnya timbullah benih-benih kebudayaan dan peradaban Islam yang baru, walaupun Bani Umayyah lebih banyak memusatkan perhatian pada kebudayaan Arab.

Selain menambah daerah taklukan, Muawiyah juga berjasa dalam mengembangkan wawasan berpikir umat Islam. Umat Islam memperoleh banyak tambahan pengetahuan dari daerah-daerah yang direbut, terutama dari kota-kota penting seperti pengetahuan tentang Matematika dan Ilmu Hitung (Van Howve; 248). Selain itu, pula kaum muslimin juga telah dapat menggunakan dengan baik pengetahuan orang-orang suku Med dan Zeth dari bangsa Sind, mengenai jalan-jalan ke negeri Sind, keadaan penduduknya dan cara mereka menghadapi musuh, di samping keberanian dan keuletan mereka dalam peperangan (Syalabi, 1990; 141).

B. Politik Ekspansi Muawiyah dalam Mempertahankan Wilayah Kekuasaan.

Pemerintahan Bani Umayyah adalah pemerintahan yang memiliki wilayah besar, meliputi wilayah yang amat luas, mulai dari negeri Sind dan berakhir di negeri Spanyol. Ia demikian kuatnya, sehingga apabila seseorang menyaksikannya, pasti akan berpendapat bahwa usaha mengguncangkannya adalah sesuatu yang tidak mudah bagi siapapun (Maududi; 2001; 249).

Muawiyah pendiri dinasti Umayyah banyak mencapai sukses besar di masa pemerintahannya, khususnya dalam hal ekspansi. Kemajuan masa pemerintahan dinasti Umayyah yang paling menonjol adalah bidang kemiliteran. Selama peperangan dengan militer Romawi, pasukan Arab mengambil pelajaran teknik kemiliteran mereka dan memadukannya dengan sistem pertahanan yang telah dimiliki sebelumnya. Pasukan Islam mendirikan tenda-tenda yang dilengkapi dengan dua sampai empat pintu dengan perlindungan benteng dan parit.

Kufah dan Basrah, merupakan basis militer untuk wilayah timur. Formasi kekuatan pasukan muslim terbagi dua barisan : barisan depan dan barisan belakang. Seluruhnya terdiri atas lima lapisan, satu lapisan untuk pasukan pusat, dua lapisan untuk pasukan sayap, lapisan penyerbu dan lapisan pertahanan (Ali;1996;222).

Selain model pertahanan ini, dibentuk pula organisasi pertahanan yang sama seperti apa yang telah dibuat oleh Khalifah Umar, hanya lebih disempurnakan. Masa Khulafaur Rasyidin tentara Islam adalah tentara sukarela, maka pada zaman Daulah Umayyah, orang masuk tentara kebanyakan dengan paksaan atau setengah paksa yang dinamakan *Nidhamut Tajnidil Ijbary* (semacam UU wajib militer) (Hasjmy; 2003; 173-175).

Di masa pemerintahannya, Muawiyah juga telah menciptakan hal-hal baru yang belum pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Ciptaannya tersebut ialah mengadakan "Dinas Pos" pada tempat-tempat tertentu di sepanjang jalan , yang disediakan kuda lengkap dengan peralatan untuk mengumumkan kejadian-kejadian penting dengan cepat (Syalabi; 1990; 33).

Muawiyah juga membangun kekuatan militer yang terdiri dari tiga angkatan, darat, laut dan kepolisian yang tangguh dan loyal. Mereka diberi gaji yang cukup, dua kali lebih besar daripada yang diberikan Umar kepada tentaranya (Pulungan, 2002;165). Ketiga angkatan ini bertuga menjamin stabilitas keamanan dalam negeri dan melaksanakan kebijakan politik luar negeri dengan memperluas wilayah kekuasaan.

C. Sistem Monarchiheriditis Bani Umayyah

Tampilnya pemerintahan Dinasti Umayyah yang mengambil bentuk Monarko, merupakan babak kedua dari praktek pemerintahan umat Islam dalam sejarah. Naik tahtanya Bani Umayyah tidak hanya menunjukkan suatu perubahan dinasti, tetapi juga memutarbalikkan suatu prinsip dan lahirnya beberapa faktor baru yang menggunakan pengaruh sangat kuat atas kekayaan kerajaan dan perkembangan bangsa (Ali,1996; 167).

Berkuasanya Muawiyah atas kendali pemerintahan merupakan tahapan peralihan yang menyimpangkan negara Islam atau Daulah Islamiyah dari sistem Khilafah ke sistem kerajaan. Abu Musa al Asyari menjelaskan

mengenai pandangan sahabat Nabi SAW mengenai perbedaan antara kekhalifahan dan kerajaan yang menunjukkan pendirian mereka secara lebih jelas, dengan kata-katanya : “kepemimpinan yang benar adalah berdasarkan musyawarah. Adapun kerajaan adalah yang dimenangkan dengan kekuatan pedang” (Maududi;2001;114).

Berdirinya pemerintahan Dinasti Umayyah tidak semata-mata peralihan kekuasaan, namun peristiwa tersebut mengandung banyak implikasi, diantaranya perubahan prinsip dan berkembangnya corak baru yang sangat mempengaruhi Imperium dan perkembangan umat Islam. Semenjak Muawiyah berkuasa, raja-raja Umayyah yang berkuasa kelak menunjuk penggantinya dan para pemuka agama menyatakan sumpah setia di hadapan raja. Sistem pengangkatan penguasa seperti ini, bertentangan dengan prinsip dasar dan ajaran permusyawaratan (Ali,1996; 116).

Suksesi kepemimpinan secara turun temurun yang berdasarka politik, lebih daripada kepentingan daripada keagamaan ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya menyatakan setia terhadap anaknya sendiri, Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh Monarchiheriditis di Persia dan Kaisar di Byzantine. Hal ini menjadi komprehensif di dalam kata-katanya “Saya adalah raja pertama dari raja-raja” (Hasan Ibrahim, 66).

Menjalankan pemerintahan berdasarkan musyawarah merupakan kaidah yang penting antara kaidah-kaidah azasi bagi pemerintahan Islam. Namun ketika sistem khilafah telah beralih menjadi sistem kerajaan, berubah pulalah kaidah ini. Permusyawaratan diganti dengan kediktatoran pribadi dan para raja menjauhkan diri dari para ahli ilmu yang berani menjauhkan diri dari para raja (Maududi, 2001;216). Sehubungan dengan sistem permusyawaratan tidak lagi diterapkan, adanya bai’at tidak lagi merupakan persyaratan untuk meraih kekuasaan dan mempertahankannya.

Bencana besar yang telah diakibatkan oleh keadaan ini adalah kosongnya suatu masyarakat yang luas dan maju dari sebuah badan yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan segala masalah hukum secara tuntas, sehingga rakyat dapat mempercayakan kepadanya urusan-urusan mereka setiap kali mereka mengingkarinya. Selama satu abad penuh, umat tidak memiliki konstitusi yang dapat diandalkan.

Perubahan yang terjadi dengan datangnya sistem yang kedua untuk menggantikan tempat yang pertama dan dampak yang timbul terhadap kehidupan kaum muslimin secara umum diantaranya sistem Arabisasi yang mulai diterapkan atau munculnya kefanatikan kesukuan (Ashabiyah Qaumiyah) yang mampu menghancurkan kesatuan bangsa Arab.

Setelah Islam datang, hapuslah fanatik Arab yang berdasarkan keturunan suku, dan semua orang Arab tergabung dalam ikatan Islam yang dinamakan al Jamiah al Islamiyah, yang selama berkuasanya Khulafaur Rasyidin tetap mengikat erat bangsa Arab (Hasjmy, 2003; 153).

Ajaran perjuangan nabi agung, Muhammad SAW menghapuskan fanatisme ras dan keusukuan selama masa republik Islam (Ali, 1996; 169). Perlakuan yang sama rata antara manusia semuanya merupakan ciri-ciri masa Islam yang pertama dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan jiwanya yang jauh dari segala bentuk fanatisme kesukuan, kebangsaan. Ajaran ini dapat dipertahankan selama pemerintahan khulafaur rasyidin. Pada akhir jabatannya, Umar RA merasa khawatir akan bangkitnya kembali berbagai macam ashabiyah kesukuan di kalangan bangsa Arab, yang pada waktu itu

belum sama sekali hilang. Meskipun kuatnya pengaruh revolusi yang dicetuskan oleh Islam di antara mereka, sehingga ia merasa khawatir bahwa dengan bangkitnya kembali perasaan ashabiyah seperti itu akan menimbulkan fitnah (kekacauan) yang melanda Islam dan kaum muslimin (Maududi, 2001;126-127).

Setelah Bani Umayyah merebut kendali Khilafah, mereka menghidupkan kembali “fanatik Arab”, dan mengembangkan lagi adat kebiasaan “badawah” (desa). Maka berkuasalah *Khusunah* (kekasaran) desa atas politik dan pemerintah mereka, dengan meninggalkan kehalusan budi bahasanya. Yang mereka benar-benar amalkan dari ajaran jahiliyah yaitu, Fanatik Quraisy dan pengutamaan kaum Quraisy atau suku-suku lainnya, yang menyebabkan timbul kemarahan dalam kalangan kabilah-kabilah lain (Hasjmy, 2003;153).

Khilafah Umayyah menghidupkan kembali kecemburuan rasial tersebut untuk membantu mencapai tujuan mereka dengan mengadu domba satu suku dengan suku lain (Ali;1996;164). Hal ini dilakukan supaya kekuatan kabilah-kabilah Arab lainnya hancur. Kendati sebelumnya Islam telah meleburkan setiap insan yang telah menerima agama Allah dan membentuk kembali mereka semua sebagai satu umat yang beroleh hak-hak yang sama didalamnya (Maududi;2001;218).

Sejak semula, pemerintahan Bani Umayyah telah tampil dengan warna keArabannya yang murni dan bersikeras untuk mempertahankannya, sehingga segala persamaan hak antara kaum muslimin yang berbangsa Arab dengan kaum muslimin yang non-Arab, hampir-hampir hilang dan luruh (Maududi,2001; 218). Dinasti ini bersifat eksklusif karena lebih mengutamakan orang-orang berdarah Arab duduk dalam pemerintahan, orang non Arab tidak mendapat kesempatan yang sama (Pulungan, 2002;171).

Politik “kasta” yang dijalankan Bani Umayyah ini, dimana dalam lingkungan kaum muslimin orang-orang Arab ditempatkan pada derajat yang tertinggi dan lebih diutamakan dari orang-orang non Arab menjadikan bertambah kesombongan orang-orang Arab atas bangsa lain, terutama muslim non Arab sendiri, bahkan mereka diberi nama jelek yaitu Al Mawaly (budak tawanan perang yang sudah dimerdekakan). Sering juga disebut al Hamra (si merah). Orang Arab memandang dirinya Sayid (Tuan) atas orang non Arab (Hasjmy;2003;154).

Abdul Malik ibn Marwan, karena kefanatikannya kepada bangsa Arab, melakukan gerakan Arabisme, yaitu semua penduduk daerah Islam diwajibkan berbahasa Arab, semua peraturan negara yang ditulis dengan bahasa Romawi dan Persia disalin ke dalam bahasa Arab. Akhirnya ditetapkan bahwa bahasa resmi negara adalah bahasa Arab, semua orang Islam terpaksa belajar bahasa Arab. Adat istiadat serta tata cara kehidupan juga harus menjadi orang Arab (Mubarok, 2004;64 dan lihat pula Maryam dkk, 2004;84).

Untuk menyempurnakan pengetahuan orang-orang bukan Arab tentang bahasa Arab, maka pengenalan bahasa dan tata krama dalam kebiasaan Arab mulai dilakukan. Selain merubah bahasa administrasi, Abdul Malik juga melakukan pembaruan dengan mencetak uang sendiri di tahun 659 M dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Dinar terbuat dari emas dan dirham dari perak (Harun Nasution, 1985;63).

Sampai dengan masa pemerintahan Abdul Malik (65-85 H/685-705 M) umat muslim hanya berkewajiban membayar zakat dan dibebaskan dari pajak lainnya. Hal ini mendorong orang non muslim untuk memeluk agama Islam. Mereka meninggalkan pertaniannya, pindah ke kota untuk menjadi militer Islam. Mereka inilah yang disebut Mawali.

Fenomena yang demikian menyebabkan timbulnya problem perekonomian negara. Pada satu sisi perpindahan agama tersebut mengakibatkan berkurangnya sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Pada sisi lain, bertambahnya militer dari Islam dari kaum Mawali tersebut memerlukan dana subsidi yang makin besar. Untuk mengatasi masalah ini, atas saran Hajjaj ibn Yusuf, Abdul Malik mengembalikan beberapa militer ke posisinya semula, yakni sebagai petani, dan menetapkan atas kewajiban membayar sejumlah pajak, sebagaimana kewajiban sebelum memeluk Islam, yakni sebesar Kharaj dan Jizyah (Ali,1996; 191).

Dalam hal, Maududi menjelaskan bahwa para penguasa telah berdalil bahwa tidnakan memeluk agama Islam dari orang-orang ini semata-mata hanya karena mereka ingin melepaskan diri dari Jizyah. Sedangkan sebab diberlakukannya Jizyah atas orang tersebut sebenarnya ialah ketakutan para penguasa akan kurangnya pemasukan baitul maal (Maududi,2001; 207).

Dengan ditetapkannya Jizyah bagi orang yang baru memeluk Islam, berarti mereka telah melanggar hukum Islam dan merupakan hambatan terbesar bagi tersiarnya agama Islam secara lebih luas.

Penonjolan bentuk baru dari imperium Arab-Muslim tidak menghilangkan ketidaktentruman yang tumbuh di beberapa perkampungan militer. Kelompok Mawali yang bekerja sebagai tentara di bidang kemiliteran dan sebagai administrasi dalam birokrasi pemerintahan menuntut persamaan status dan previlese dengan kelompok Arab. Pasukan militer menuntut hak untuk berperan dalam *diwan-diwan* kemiliteran. Para petani yang memeluk Islam juga menuntut hak terhadap pembebasan dari pungutan pajak, sama seperti kaum Arab lainnya (Lapidus,1999; 95).

Dalam perluasan kerajaan Islam, jasa para Maula tidak kurang pentingnya, dibandingkan jasa para orang Islam Arab. Namun para khalifah Umayyah menghapuskan semua kewenangan dan hak istimewa mereka di negara itu (Ali,1996; 236). Akibatnya mereka menjauhkan diri dari pemerintahan Umayyah dan mencari kesempatan untuk menggulingkan rezim Umayyah.

Akan tetapi, masa pemerintahan khalifah Umar ibn Abdul Aziz telah merupakan nikmat dan kebahagiaan bagi agama Islam dan kaum muslim, terutama dengan membaiknya hubungan pemerintahan dengan golongan oposisi. Misalnya hubungan dengan kaum Mawali yang dianggap warga kelas dua. Meskipun mereka dianggap warga kelas dua, tetapi berperan penting dalam ilmu pengetahuan (Musyrifah, 43). Memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasannya (Ahmad Amin, 1987;104). Ini berarti konsolidasi internal merupakan sasaran utama kebijakan Umar.

Pemerintahannya menumbuhkan kembali kekuatan demokratis, walaupun setelah ia wafat timbul lagi usaha mengembalikan otokrasi di bawah Hisyam. Usaha ini mengalami kegagalan yang akhirnya memuncak pada keruntuhan kekhalifahan Umayyah di tangan kaum Abbasiyah (Jamil Ahmad, 1994;55).

Umar bin Abdul Aziz berusaha menghapuskan ketidaksamaan kedudukan antara kelompok muslim Arab dengan muslim non-Arab. Setelah Umar mengetahui bahwa rakyat dengan sengaja menghindar dari membayar pajak dengan jalan masuk Islam, maka Umar melarang penjualan tanah oleh orang bukan Islam kepada orang lain. Ia juga menetapkan Kharaj bagi orang Islam, dan orang bukan Islam harus membayar Jizyah sebagai imbalan bagi perlindungan yang diberikan kepada mereka. Dengan demikian orang Islam diwajibkan menyokong pendapatan negara dan negara tidak mengalami kerugian (Ali, 1996; 204).

Bani Umayyah tidak hanya melaksanakan perlakuan diskriminasi terhadap orang-orang Ajam (Mawali) saja. Mereka juga menyebarluaskan penyakit ini di kalangan suku-suku Arab sendiri. Mereka telah menghidupkan kebencian, kecenderungan kesukuan yang memang telah berakar di antara suku-suku Yaman dan orang Arab *mudar*. Para wali negeri Arab lebih cenderung kepada anggota Kabilah dari negeri asal mereka masing-masing dan bersikap fanatik kepada mereka, serta bertindak adil terhadap orang-orang selain mereka (Maududi, 2001; 221).

Maka berkecamuklah pertikaian antara kabilah-kabilah Yaman dan Mudhar di Khurasan, yang telah dimanfaatkan oleh Abu Muslim al Khurasahi, juru dakwah kaum Bani Abbas. Mereka didorong untuk berperang satu sama lain, sehingga ia berhasil menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah.

Penutup

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa berkuasanya Muawiyah atas kendali pemerintahan merupakan tahap peralihan yang menyimpangkan negara Islam atau Ad Daulah al Islamiyah dari sistem khilafah ke sistem kerajaan. Akan tetapi kebijakan Muawiyah pada perluasan wilayah kekuasaan negara merupakan ekspansi besar-besaran kedua yang berhasil menjadikan kekuasaan Islam semakin luas dan Umayyah berhasil membangun negara besar di zaman itu. Fokus utama kekuasaan Bani Umayyah adalah perluasan wilayah, hal ini berbeda dengan pemimpin sebelumnya, terutama zaman Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah juga sukses menimbulkan kembali fanatisme Arab yang sebelumnya berhasil diredam oleh perjuangan Nabi SAW.

Referensi

Al Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Penerbit Mizan, Bandung, 1990
Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2001.

Ali, K, *Sejarah Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996

Lapidus, Ira M, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Mughni, Syafiq, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspeknya*, UI Press, Jakarta, 1985

Syalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, PT Pustaka Alhusna, Jakarta, 1990

Pulungan, Jufri, Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2003

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000